

Kampung-Kota dan Permukiman Kumuh di Kota Bandung Tahun 1965-1985

Bagas Yusuf Kausan, Putri Agus Wijayati, dan Atno ✉

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Semarang-Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Februari 2019
Disetujui April 2019
Dipublikasikan Juli 2019

Keywords:

kampung-kota, slums settlement, Bandung.

Abstrak

Pada tahun 1970-1980an, seiring dengan berkembangnya perencanaan kota metropolitan, masalah permukiman menjadi satu gejala yang terjadi nyaris di setiap kota besar di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh daya tampung kota yang terbatas, sementara lonjakan jumlah penduduk akibat dari urbanisasi terus mengalami peningkatan. Akibatnya banyak para pendatang yang kemudian bermukim di lahan-lahan tidak terpakai dan mengisi kantong-kantong perkampungan kota yang sebelumnya telah ada. Penelitian ini membahas tentang sejarah kampung-kota, terutama terkait posisinya dalam perencanaan kota yang semakin modern. Lebih lanjut, penelitian ini mencoba melihat cara pemerintah memandang perkampungan-kota dan meninjau upaya apa saja yang pernah dilakukan pemerintah guna memperbaiki lingkungan perkampungan kota tersebut. Setelah ditinjau, dalam rentang tahun 1970-1980an, aneka bentuk program perbaikan perkampungan pernah dilaksanakan di Kota Bandung. Meskipun ada pula program perbaikan perkampungan yang murni diinisiasi secara swadaya oleh masyarakat, sebagian besar program perbaikan perkampungan pada saat itu merupakan proyek pemerintah yang bekerja sama dengan beberapa lembaga filantropi. Namun dengan hanya mengambil fokus pada perbaikan aspek fisik perkampungan, beberapa program perbaikan pun tidak berdampak secara signifikan terhadap masyarakat. Sebab, membaiknya lingkungan perkampungan tidak menjamin membaiknya kondisi perekonomian mereka yang lebih banyak terserap ke dalam ekonomi informal perkotaan.

Abstract

In the 1970s-1980s, along with the development planning of the metropolitan city, the issue of the settlements into a single symptom that happens almost in every big city in Indonesia. This is caused by the limited capacity of the city, while a surge in population resulting from urbanization continued to increase. As a result many migrants who later settled in land unused and filling the pockets of the kampung-kota of the city which had previously existed. This study discusses the history of the kampung-kota, especially those associated its position in an increasingly modern city planning. Further, this research is trying to see how the Government viewed the kampung-kota and simultaneously reviewed what efforts the Government has to improve the environment of the settlement. After observation, in the 1970-1980s, various forms of the settlement repair program ever undertaken in the city of Bandung. Although there is also a pure settlement improvement program was initiated by the non-governmental community, in the majority of program improvements the kampung-kota at that time was a Government project that worked with philanthropic foundations. But just take a focus on improvements to the physical aspect of the kampung-kota, a few repair programs were not significantly impact on the community which settled in the settlement of the city. For improving the environment of settlement does not warrant improving the condition of their economy are more absorbed into the urban informal economy.

© 2019 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Ruang Jurnal Sejarah, Gedung C5 Lantai 1 FIS Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: sejarah@mail.unnes.ac.id

ISSN 2252-6633

PENDAHULUAN

Kehadiran lingkungan permukiman di perkotaan, tidak dapat dipisahkan dari eksistensi wilayah perdesaan pada masa sebelumnya. Artinya, tidak ada kota beserta lingkungan permukiman di dalamnya yang terlahir secara tiba-tiba (Purnawan, 2010:846). Bahkan substansi sejarah kota itu sendiri kerap disebut sebagai sejarah yang menyeluruh (*total history*). Hal itu berarti bahwa sebuah kota merupakan subyek yang terus berproses, yakni dari suatu pengertian yang sederhana ke pengertian yang lebih kompleks (Nandang, 2010:274). Dalam hal ini termasuk persoalan permukiman di area kota, yang lebih umum dikenal dengan sebutan kampung-kota (Pele, 2013:4). Sebagai sebuah “proses menjadi”, kampung-kota merupakan bentuk transformasi dari kampung perdesaan/rural yang kemudian berkembang menuju ke arah corak kehidupan perkotaan/urban (Pele, 2013:17). Bahkan kebanyakan dari kota-kota yang ada hari ini, pada dasarnya merupakan desa agraris yang mengalami aglomerasi dalam bentuk pemadatan (intensifikasi) dan perluasan (ekstensifikasi). Desa agraris yang kemudian dapat bertransformasi dengan memadat dan sedikit membesar itulah yang kemudian membentuk wilayah kampung-kota (Johan, 2015:3). Hal demikian pula yang terjadi dalam konteks permukiman di wilayah Kota Bandung

Satu hal penting yang kerap mencuat ketika membicarakan permukiman di kota adalah keterkaitan antara kekuasaan, modal, dan urbanisasi. Dalam konteks Kota Bandung, persoalan semacam ini dapat kita temukan dari penelitian yang dilakukan oleh Gustaaf Reerink. Dalam penelitian tersebut, Reerink menunjukkan bahwa sejak era kolonialisme Belanda hingga era kemerdekaan Indonesia, tidak ada satu pun rezim kekuasaan yang mampu menjalankan kontrol yang efektif terhadap kampung-kota secara keseluruhan. Serupa dengan rezim kolonial, pemerintah Indonesia pun hanya mampu menjalankan kontrol terhadap kampung-kota melalui program perbaikan perkampungan yang mewujudkan dalam pembangunan fisik. Bahkan hal tersebut baru bisa dilakukan setelah

terlebih dahulu mengklasifikasi dan sekaligus menstigma suatu perkampungan dengan sebutan *informal slum* (Reerink, 2014:194-195).

Martin van Bruinessen, dengan mengambil satu studi kasus di daerah Sukaparkir, Bandung, juga menunjukkan bahwa perkembangan perkampungan kumuh di Bandung tidak terlepas dari migrasi yang terus terjadi ke daerah tersebut. Proses migrasi ke Bandung sudah dimulai sejak era kolonialisme Belanda dan semakin memuncak sekitar tahun 1960an (Martin, TT:3-4). Desakan jumlah penduduk inilah yang kemudian menciptakan kantong permukiman kumuh dengan ekonomi informal sebagai penopang kehidupan sehari-hari warganya. Tidak heran, masyarakat yang bermukim di kampung-kota cenderung diposisikan sebagai penghambat jalan menuju kota yang modern. Maka, berdasarkan latar belakang di atas, saya pun merumuskan satu permasalahan utama yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yakni mengapa perkampungan kota di Bandung menjadi korban dalam proses modernisasi kota sepanjang tahun 1965-1985? Dari permasalahan utama tersebut, saya pun menurunkannya menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi eksistensi kampung-kota, sekaligus mempengaruhi wacana tentang permukiman kumuh? (2) Bagaimana kondisi kampung-kota pada tahun 1965-1985? dan (3) Mengapa pemerintah perlu merancang proyek perbaikan kampung dan apa dampaknya bagi perkampungan kota di Bandung?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah metode penelitian sejarah. Metode ini terdiri dari empat tahapan yakni; heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Heuristik merupakan tahapan untuk mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan (Kuntowijoyo, 2013:95). Pada tahap heuristik, saya mengumpulkan data melalui proses penggalian sumber sejarah yakni sumber tertulis. Dalam hal ini, saya mengumpulkan sumber tertulis berupa surat kabar dan dokumen sezaman yang

dikategorikan sebagai sumber primer. Sebagian besar sumber primer saya dapat dari Kantor Arsip PT. Balai Iklan di Bandung yang menyimpan surat kabar *Pikiran Rakyat* periode tahun 1970-1980an dan surat kabar *Kompas* dengan periode tahun yang sama. Sayangnya, ada beberapa edisi *Kompas* di PT. Balai Iklan yang tidak saya temukan. Sementara sumber primer lainnya, saya dapat dari kantor Arsip Daerah Kota Bandung berupa beberapa dokumen yang terkait dengan penelitian saya, terutama dokumen pelaksanaan program *Bandung Urban Development Project* tahun 1985.

Selain sumber primer, saya pun mengumpulkan beberapa sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan majalah. Beberapa sumber sekunder saya dapatkan dari Perpustakaan Kolsani Yogyakarta berupa terbitan majalah *Prisma* tahun 1970-1980an, Arsip Suara Merdeka Semarang berupa terbitan *Tempo* edisi tahun yang sama, Perpustakaan Daerah Kota Bandung berupa beberapa naskah dan data sejarah terbitan Pemerintah Kota Bandung, dan aneka jurnal yang dapat diakses secara bebas melalui internet. Sementara untuk sumber sekunder berupa buku, sebagian besar saya dapatkan dari hasil mencari sendiri. Guna meraih penggambaran yang lebih mendalam, saya juga menggunakan sumber non-konvensional seperti foto dan peta yang saya dapatkan dari koleksi Arsip Nasional Indonesia, koleksi beberapa situs arsip Belanda, dan koleksi arsip perseorangan.

Setelah tahap heuristik, saya pun masuk ke dalam tahap selanjutnya berupa kritik sumber. Dalam tahap ini, saya melakukan pemilahan sumber mana yang relevan untuk dimasukkan ke dalam referensi dan sumber mana yang tidak. Dalam metode penelitian sejarah, kegiatan ini disebut sebagai kritik internal. Setelah melakukan kritik sumber, saya pun mulai melakukan praktik menafsirkan fakta-fakta yang diperoleh dari data yang telah diseleksi. Tahap ini disebut dengan interpretasi. Setelah tiga tahap metode penelitian sejarah di atas, saya pun sampai pada tahap historiografi atau penulisan sejarah yang terejawantah dalam tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari Permukiman Desa Ke Permukiman Kota

Apa yang terjadi dengan Kota Bandung hari ini, sudah tentu tidak terjadi begitu saja. Perlu rentang waktu yang sangat panjang bagi Kota Bandung untuk merubah kondisi sosio-spasial permukimannya dari yang sebelumnya bercorak perdesaan, hingga kemudian berubah menjadi permukiman khas kota metropolitan. Perubahan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, beberapa diantaranya adalah semakin melejitnya industri perkebunan di Priangan, politik pemerintahan kolonial, hingga ledakan urbanisasi pasca kemerdekaan. Oleh sebab itu, membicarakan perubahan lanskap wilayah Bandung dari perdesaan menjadi perkotaan menjadi tidak mungkin jika tidak mengaitkannya dengan aneka kebijakan yang berlaku pada masa kolonialisme Belanda. Sebab, dari kebijakan-kebijakan yang berlaku pada masa kolonialisme itulah pondasi metropolitanisasi yang terjadi di Bandung bermula. Seperti dalam konteks kebijakan Preanger Stelsel misalnya. Selain berdampak terhadap ruang geografis, secara tidak langsung, kebijakan tersebut turut memaksa rakyat bumiputera untuk bermukim pada suatu daerah tertentu dalam jangka waktu yang lama. Kondisi itulah yang menjadi awal perubahan lanskap sosio-spasial dari permukiman desa menjadi permukiman kota (Ekadjati, 1995:118). Sebab, dengan kehidupan yang mulai menetap pasca pemberlakuan Preanger Stelsel, terjadi pertemuan yang cukup intens antara keluarga cikal bakal dan para penduduk yang baru. Mereka akhirnya sama-sama menetap di satu tempat dalam jangka waktu yang panjang, saling membantu dan bekerja sama, serta mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar. Melalui interaksi inilah kemudian muncul budaya bermukim yang dalam masyarakat Sunda disebut dengan kampung (Pele, 2013:39).

Kondisi tersebut semakin jelas ketika pemerintah Kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Tanam Paksa. Selain mendapat kecaman keras dari orang-orang Balanda seperti Baron van Hoevell dan Multatuli, ternyata kebijakan ini pun berdampak pula terhadap perluasan lahan perkebunan ke desa-desa di

sekitar kota. Hal ini terjadi pula di Bandung yang pada masa Tanam Paksa, berfungsi sebagai pusat pengumpulan, penyimpanan, dan pengiriman produk pemerintah dari daerah penghasil komoditi. Tidak heran, banyak kampung di sekitar Bandung yang mengalami perubahan teritorial dari yang sebelumnya desa menjadi masuk ke dalam teritori kota. Sementara itu, sejak pemberlakuan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) 1870, mulai banyak perusahaan perkebunan swasta yang menguasai ratusan hektar tanah dan menciptakan kondisi bagi akumulasi kapital dengan cara merongrong kontrol masyarakat atas sumber produksi (Ahmad, 2011:06). Melalui kebijakan tersebut, banyak daerah di Priangan yang menjadi lahan perkebunan kopi, karet, kina, dan teh yang pada masa itu, menjadi komoditi ekspor yang laku di pasaran dunia (Her, 2014:11). Keuntungan dari hasil perkebunan itu pula yang kemudian dibawa ke Kota Bandung sebagai katalisator modernisasi kota.

Seperti kota di Hindia Belanda lainnya, Kota Bandung pun akhirnya dibangun di atas kepentingan pemerintahan dan orang-orang Belanda secara keseluruhan. Tata kota pun didesain sedemikian rupa agar nyaman untuk menjadi permukiman orang-orang Belanda dan Eropa, sekaligus menjadi miniatur perkotaan Eropa di tanah jajahan. Selain itu, kondisi ini pun merangsang tumbuhnya proyek pembangunan dan perubahan lanskap kota secara drastis. Namun bagi sebagian rakyat bumiputera, aneka proyek tersebut justru menggusur kampung dan lahan pertanian mereka. Maka tidak heran, hingga tahun 1920, setidaknya terdapat sepertiga dari kawasan asli penduduk bumiputera yang hilang. Para penduduk bumiputera yang pada masa sebelum perang dunia pertama berjumlah 7000 jiwa, terpaksa tersingkir dan dikumpulkan di daerah permukiman yang tersisa (Voskuil, 2017:63). Namun demikian, akibat dari geliat modernisasi pada awal abad ke 20, Kota Bandung pun terus berkembang hingga menjadi:

Kota jajahan besar, modern dengan wilayah kota untuk tempat tinggal mewah, boulevard dan taman-taman, sebagai "Parijs van Java", penuh fasilitas pendidikan tinggi,

pemerintahan, rekreasi dan hiburan. Kereta api cepat dan bandar udara yang perlengkapannya bagus membuat kota ini nyaman dan mudah dicapai, dan melalui alat-alat telekomunikasi modern orang Bandung dapat berkomunikasi dengan Eropa... (Voskuil, 2017:75-76).

Sementara itu, penduduk bumiputera tetap saja tinggal di perkampungan kota yang kumuh dan menggantungkan hidupnya sebagai pembantu rumah tangga, pedagang eceran, dan pertukangan. Kondisi semacam ini tetap berlangsung, bahkan hingga Indonesia mencapai kemerdekaan. Salah satu peristiwa pada masa awal kemerdekaan, atau yang lebih lazim disebut dengan era revolusi fisik (1945-1950) ialah peristiwa Bandung Lautan Api. Dalam peristiwa ini, rakyat pribumi yang berdomisili di Bandung melakukan tindakan membunuh hanguskan kota beserta perkampungannya. Alhasil, pada saat peristiwa Bandung Lautan Api sedang berkecamuk, terjadi penurunan secara drastis jumlah penduduk dari 433.281 jiwa pada tahun 1945, hingga hanya tersisa sekitar 100.000 jiwa (Sapria, 1970:20). Namun setelah Bandung dirasa aman, rakyat yang memilih mengungsi keluar pun secara berangsur-angsur kembali memasuki kota. Mereka pun kembali membangun rumahnya menggunakan sisa-sisa bangunan rumah dan ada pula yang membangun rumah sejak awal dengan harta kekayaan yang tidak seberapa (Sitaresmi, 2002:67). Selain membuat jumlah penduduk kota semakin bertambah, arus balik para pengungsi ini pun membuat perkampungan kota kembali padat. Kondisi ini memuncak pada tahun 1950an ketika terjadi safari politik kelompok DI/TII.

Seperti yang tertulis dalam memoar Us Tiarsa, selama gerakan politik Kartosuwiryo berlangsung, banyak dari masyarakat pedalaman di kota/kabupaten sekitar Bandung yang merasa terganggu hingga memutuskan untuk mengungsi. Kebanyakan dari mereka mengungsi ke Bandung, terutama karena Bandung dianggap memiliki jaminan keamanan yang lebih baik. Selain itu, Kota Bandung pun dipersepsikan sebagai kota yang menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan (Tiarsa, 2001:39). Tidak

heran, pada masa ini penduduk Bandung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebagian besar para pendatang itu pun mulai bermukim di lahan-lahan kosong, ataupun bermukim di perkampungan lama yang telah ada sebelumnya. Satu perkampungan baru yang muncul akibat gelombang pengungsian pada tahun 1950-an ialah Kampung Bagusrangin (Pele, 2013:121). Namun, meskipun kondisi sosial-politik mulai terkendali pada awal tahun 1960an, hal tersebut tetap tidak dapat menghentikan lonjakan penduduk yang terlanjur terjadi. Alhasil banyak dari warga yang tinggal di perkampungan tanpa memiliki status lahan yang jelas. Kelak, perkampungan itulah yang disebut dengan perkampungan kota yang hidup dari aktivitas ekonomi informal. Selain itu, mereka pun cenderung jauh dari akses pelayanan kota, sehingga kerap dilabeli sebagai perkampungan kumuh.

Bandung Heurin Ku Tangtung: Masalah Permukiman Tahun 1965-1985

Seperti yang telah banyak diketahui, pada tahun 1965 Indonesia mengalami huru-hara politik yang kemudian menjadi tonggak pergantian kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Sedikit berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, Presiden Soeharto terkenal dengan ambisinya untuk merealisasikan pembangunan yang bertumpu pada stabilitas ekonomi dan politik. Tidak heran, sejak Rapelita I mulai dijalankan, pemerintahan Presiden Soeharto terus mendorong kebijakan pemulihan ekonomi yang ambisius di perdesaan dan perkotaan. Bersamaan dengan itu, seperti kota besar lainnya, Kota Bandung pun mulai mengadopsi paradigma perencanaan kota yang baru.

Rancangan kota tersebut termaktub ke dalam Masterplan Bandung 1965-1985. Berbeda dengan konsep perkotaan warisan Kolonial yang membentuk struktur kota berciri segregasi rasial, melalui rancangan kota yang baru, struktur kota pun diubah menjadi kategori-kategori fungsional (zoning). Dua ciri khas perencanaan kota (modern) ini adalah terwujudnya keseimbangan dan kesamaan dalam pembangunan ke setiap

penjuru kota; dan menciptakan pusat dan sub pusat kota yang diatur secara fungsional dan terikat oleh batas-batas administrasi (Pele, 2013:132).

Di samping itu, memasuki awal tahun 1970, laju pertumbuhan penduduk Bandung telah mencapai angka 3,2%. Pertumbuhan ini sangat berkaitan dengan perluasan kampung-kampung secara spontan yang berada di pinggiran kota dan area persawahan di sekitarnya (Voskuil, 2017:189). Maka tidak mengherankan, lonjakan pertumbuhan penduduk tersebut berbanding lurus dengan kebutuhan akan permukiman. Bagi orang-orang yang memiliki dana berlebih, tentu ia bisa membeli rumah di beberapa real estate yang baru saja dibangun, atau dengan membeli rumah di Perumnas. Namun bagi masyarakat yang tidak memiliki dana berlebih, mereka berangsur-angsur bermukim di lahan-lahan yang tidak terpakai. Oleh pemerintah, kelompok masyarakat inilah yang disebut dengan pemukim liar.

Meskipun disebut pemukim 'liar', seperti yang dinyatakan Ketua DPRD Kota Bandung, Irawan Sarpingi, sebenarnya banyak dari penghuni rumah liar tersebut yang membayar retribusi. Pemerintah Kota Bandung pun sempat 'menertibkan' bangunan liar tersebut seluas 1.176 m persegi ("Rumah2 Liar Tiap Tahun Bertambah", 07 April 1970). Pada saat itu jumlah bangunan liar di Kota Bandung berjumlah 15.600 buah dan penghuninya ditaksir telah menyentuh angka 78.000 jiwa. Bangunan liar tersebut kebanyakan merupakan bangunan tidak permanen. Namun maraknya penggunaan tanah untuk bangunan liar bukan tanpa alasan. Banyak dari pemukim liar yang tinggal di perkampungan kota merupakan orang-orang yang pindah dari desa, namun belum memiliki kepastian tempat bermukim di kota. Hal tersebut dapat ditinjau dari penuturan Ato Yusman terkait keberadaan Kampung Babakan Jawa:

...dulu daerah ini (Babakan Jawa) lahannya kosong berupa kebun. Pertama dihuni oleh pedagang asongan/tukang loak kebetulan berasal dari Jawa yang merantau ke Jawa Barat. Karena tidak memiliki rumah maka

kedua orang tersebut mendirikan sesaungan lama kelamaan kedua orang tersebut membawa teman-teman seprofesinya yang juga kebetulan orang Jawa menduduki daerah ini, mulailah tempat ini dihuni oleh etnis Jawa ("Sadang Serang Dalam Ingatan", 21 Januari 2011).

Apa yang terjadi di Babakan Jawa, sebenarnya terjadi pula di berbagai kantong kampung-kota yang tersebar di Bandung. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, gelombang urbanisasi ke Bandung memang sudah mencuat sejak tahun 1950an. Namun aglomerasi dari proses terciptanya perkampungan kota justru terjadi pada tahun 1970an. Kondisi ini berlangsung bersamaan dengan kebutuhan permukiman di Bandung yang terus mengalami peningkatan, Bahkan menurut perkiraan, Kota Bandung ditaksir masih membutuhkan sekitar 100.000 rumah lagi dan itu membutuhkan lahan seluas 4.500 hektar. Sementara tanah yang tersisa untuk dijadikan perumahan, hanya tersisa 650 hektar. Hal tersebut ditegaskan pula oleh Menteri Perumahan Rakyat, Cosmas Batubara, yang mengatakan bahwa selama Pelita-II, di Kota Bandung harus dibangun 7000 rumah murah ("25 pCt Rumah di Bandung Merupakan Bangunan Liar", 14 Juli 1978).

Persoalan lonjakan jumlah penduduk dan kebutuhan akan permukiman baru, membuat pemerintah melaksanakan beberapa proyek permukiman. Pemerintah bahkan memberikan subsidi untuk pembangunan Perumnas di berbagai daerah. Di Kota Bandung, pembangunan Perumnas tahap awal dilakukan di Sukaluyu, Sadang Serang, Cijerah, dan Sukajadi ("Rumah Murah di Bandung dan Cirebon: Antara yang Mendesak dan yang Sudah Jenuh", 10 Febuari 1978). Sementara itu, tujuan dari pembangunan Perumnas sendiri ialah untuk memicu sektor swasta agar mau membangun permukiman untuk kelas bawah (Pele, 2013:138). Tidak heran, sebagai konsekuensi dari hasrat menjadi kota modern, di Kota Bandung pun mulai berkembang permukiman yang didorong oleh investor. Sebab, seperti yang dinyatakan oleh Dirut Bangun Cipta Sarana, Jakarta, bahwa pada paruh kedua tahun 1970an,

bisnis rumah mewah merupakan bisnis yang menguntungkan ("Pembangunan Perumahan Maju Pesat Dikhawatirkan Tumbuh Slum Baru", 1983:75).

Meski pertumbuhan proyek permukiman swasta semakin pesat, pada akhir tahun 1970an, tigaperempat dari penduduk Bandung masih tinggal di permukiman informal yang dibangun oleh penduduk secara perorangan tanpa memperhatikan aturan, tanpa bantuan para tukang, ataupun dibangun oleh pemborong terdaftar. Pada tahun 1976, total luas permukiman yang berwujud semacam itu menyentuh angka 2.100 ha dari 44% daerah yang telah terbangun di Kota Bandung (Voskuil, 2017:194). Meski demikian, dalam perkembangan kota yang semakin metropolitan, perkampungan kota semacam itu justru merupakan jenis permukiman yang paling rentan untuk disingkirkan, baik itu dengan cara penggusuran, ataupun dengan cara melabelinya sebagai permukiman liar dan kumuh.

Menata Permukiman Kumuh

Seperti yang telah disinggung di bagian sebelumnya, pada tahun 1970-1980an, sebagian besar penduduk Bandung, atau sekitar setengah dari seluruh rumah tangga, masih tinggal di kampung-kampung dan kawasan permukiman yang tidak direncanakan. Beberapa ciri dari model kawasan permukiman semacam itu ialah; rumah-rumah saling berhimpitan, lalu-lintas mobil sulit dan/atau bahkan tidak bisa sama sekali, minim fasilitas dasar permukiman seperti saluran air, riol, jalan, jembatan, dan tempat pengumpulan sampah secara teratur. Buruknya kondisi lingkungan tersebut, sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Bahkan sejak masa Kolonialisme Belanda hingga era Negara Republik Indonesia, persoalan tersebut seolah memang telah menyejarah dalam ruang keseharian penduduk Kota Bandung, lengkap beserta aneka program untuk memperbaikinya.

Program perbaikan kampung-kota, sebagian besar memang diinisiasi oleh pemerintah. Selain itu, banyak pula program perbaikan perkampungan yang merupakan hasil dari kerja sama antara pemerintah dengan

instansi lain yang memiliki sokongan dana yang besar. Meski demikian, sebenarnya ada pula program perbaikan kampung yang murni hasil inisiasi masyarakat kampung itu sendiri. Sebagai contoh, hal tersebut terjadi di Kecamatan Cicendo pada tahun 1970an. Dengan menggunakan dana swadaya masyarakat, dua Rukun Warga (RW) di Kelurahan Pajajaran Dalam, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung melangsungkan proyek perbaikan jalan/gang. Proyek perbaikan yang selesai pada tahun 1973 ini dikerjakan secara gotong-royong oleh seluruh warga. Sementara itu, dalam hal ini, pemerintah pun sempat melaksanakan kebijakan perbaikan perkampungan seperti terlaksana berkat kerjasama dengan UNEP (1977-1980) dan UNICEF (1984-1989).

Sebagian besar program perbaikan perkampungan tersebut, menysasar tempat bermukim masyarakat yang disebut dengan kampung-kota. Selain memperbaiki dari aspek fisik, meskipun tidak jelas dampaknya, program perbaikan tersebut juga sedikit menysasar aspek sosial-ekonomi (Voskuil, 2017:195). Namun program yang segmentasinya paling luas ialah proyek *Bandung Urban Development Project* (BUDP) yang dikerjakan di beberapa titik.

Seperti proyek perbaikan sejenis di kota besar lainnya, proyek BUDP pun memiliki nama 'lokalnya' sendiri yakni Proyek "Dewi Sartika". Perwakilan dari tim proyek tersebut, Ir. Soetikni Soentoro, menyebutkan bahwa tujuan diadakannya proyek "Dewi Sartika" adalah untuk membuat perubahan-perubahan perbaikan tingkat lingkungan hidup, dengan sasaran keluarga atau masyarakat yang berpendapatan rendah, melalui penyediaan serta perbaikan utilitas perumahan dan pelayanan sanitasi. Proyek ini direncanakan berjalan sampai tahun 2001 dan dilaksanakan secara bertahap ("*Daerah Sekilas*", 01 Juli 1985).

Tahap awal proyek ini dilaksanakan di tiga kelurahan yakni Padasuka, Babakan Surabaya, dan Nyengseret dengan luas areal 385,3 hektar yang melayani 107.794 jiwa penduduk ("*Proyek Dewy Sartika Perbaiki Lingkungan*", 12 Januari 1985). Namun dalam pelaksanaannya, proyek Dewy Sartika

sebenarnya masih menyisakan banyak sekali persoalan dan hambatan. Salah satu hambatan dari proyek tersebut ialah kemungkinan terhentinya proyek di tengah jalan akibat dari kekurangan dana untuk mendampingi pinjaman dari *Asia Development Bank* ("*BUDP Dewy Sartika Terhenti*", 09 Oktober 1986). Hal ini tentu menghambat ambisi pemerintah untuk meningkatkan mutu lingkungan kampung-kota di tengah deru nafas modernisasi.

Di samping itu, dalam beberapa kasus, proyek Dewy Sartika justru mendorong masyarakat dari kelompok ekonomi menengah ke bawah untuk pindah ke perkampungan yang telah diperbaiki. Secara tidak langsung, fenomena tersebut memaksa penduduk yang berpenghasilan rendah untuk pergi dari perkampungan yang telah tertata rapih, dan pindah ke kampung-kota lain yang tidak tersentuh proyek perbaikan kampung (Voskuil, 2017:195). Dengan demikian, alih-alih memperbaiki lingkungan perkampungan beserta kondisi sosial-ekonomi penduduknya, proyek Dewy Sartika justru merangsang perpindahan penduduk baru dan semakin mendorong pemadatan perkampungan kota. Selain itu, program perbaikan kampung yang lebih menysasar aspek fisik juga menunjukkan bahwa:

"Memperbaiki lingkungan rumah saja bukanlah berarti akan memperbaiki kehidupan penduduk kota. Jika masyarakat berpendapatan rendah pindah ke lingkungan rumah yang lebih baik, tapi tetap hidup terpisah dalam lingkungan suku/ras dan lingkungan ekonomi, jauh dari tempat kerja dan tempat fasilitas umum, berarti kehidupan mereka belumlah diperbaiki" ("*Tempat Tinggal untuk yang Tak Punya Rumah*", 1986:77).

SIMPULAN

Pada tahun 1980an, Kota Bandung telah tumbuh menjadi kota metropolitan dengan modernisasi di segala sektor sebagai ciri utamanya. Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak terkendali. Selain karena geliat ekonomi yang mulai tumbuh, beberapa peristiwa politik seperti Bandung Lautan Api dan aktivitas politik DI/TII juga turut menjadi

penyebab arus urbanisasi ke dalam kota. Para pendatang yang menggantungkan hidupnya di Kota Bandung, sebagian besar berasal dari perdesaan yang ada di wilayah Priangan. Meski demikian, ada pula para pendatang yang berasal dari luar wilayah Bandung yang kemudian, membentuk wilayah permukiman sendiri berdasarkan tempat dari mana ia berasal. Pada saat memuncaknya arus urbanisasi kota, tidak semua pendatang mendapatkan tempat yang layak untuk bermukim. Banyak dari mereka yang hanya bertempat tinggal di bangunan sederhana, bahkan ada pula yang terpaksa bermukim di tanah kuburan. Akhirnya di tempat itulah mereka menjalani kehidupan sehari-hari, di tengah deru nafas kota yang sedang bersolek untuk menjadi kota metropolitan.

Pemerintah pun tidak tinggal diam untuk menanggulangnya. Aneka proyek perbaikan kampung pun marak dilaksanakan pada era tahun 1970-1980an. Hal ini tidak terlepas dari hasrat pemerintah kota untuk 'meremajakan' wajah kotanya. Apalagi dalam kondisi iklim perencanaan kota yang sedang diarahkan menuju kota metropolitan, maka keberadaan suatu perkampungan yang kumuh kerap dianggap sebagai beban dari kota itu sendiri. Logika semacam inilah yang mewarnai perkampungan kota di Bandung pada tahun 1980an. Di Bandung sendiri, setidaknya tercatat beberapa lokasi perkampungan yang masuk ke dalam target perbaikan kampung. Beberapa diantaranya adalah Babakan Surabaya, Nyengseret, dan Padasuka. Dengan lebih memfokuskan pada aspek fisik, proyek perbaikan perkampungan yang diinisiasi pemerintah pun tidak menghasilkan dampak yang signifikan. Kondisi sosio-ekonomi penduduk kampung-kota tetap tidak berubah secara drastis. Mereka tetap menjadi lapisan paling bawah dalam hierarki penghuni kota. Di samping itu, oleh karena kepemilikan modal yang amat terbatas, mereka pun kalah telak dalam serangkaian perebutan ruang kota. Bahkan tidak hanya dalam hal berebut ruang fisik kota, penduduk perkampungan kota juga kalah dalam perebutan wacana terkait estetika kota.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel, Surat Kabar, dan Majalah

- "25 pCt Rumah di Bandung Merupakan Bangunan Liar", dalam *Kompas* 14 Juli 1978.
- "Daerah Sekilas", dalam *Kompas* 01 Juli 1985.
- "Pembangunan Perumahan Maju Pesat Dikhawatirkan Tumbuh Slum Baru", dalam *Prisma* No. 4, April 1983. "Proyek Dewi Sartika Perbaiki Lingkungan", dalam *Pikiran Rakyat* 12 Januari 1985.
- "Rumah2 Liar Tiap Tahun Bertambah", dalam *Pikiran Rakyat* 07 April 1970.
- "Rumah Murah di Bandung dan Cirebon: Antara yang Mendesak dan yang Sudah Jenuh", dalam *Kompas* 10 Febuari 1978.
- "Sadang Serang dalam Ingatan" dalam *allaboutsadangserang.com* (Diakses pada tanggal 17 September 2018).
- "Tempat Tinggal untuk yang Tak Punya Rumah", dalam *Prisma* Mei 1986.

Buku, Jurnal, dan Skripsi

- Basundoro, Purnawan. "Dari Kampung Desa Ke Kampung Kota: Perubahan Ekologi Kota Surabaya Dalam Perspektif Permukiman Pada Masa Kolonial" dalam *Jantra* Vol. V, No. 10.
- , "Perebutan Ruang Kota: Problem Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan Perkotaan di Indonesia", dalam Naskah Orasi Ilmiah Sidang Dies Natalis Universitas Airlangga, 11 November 2013.
- , "Problem Pemukiman Pascarevolusi Kemerdekaan: Studi Tentang Pemukiman Liar di Kota Surabaya 1945-1960" dalam *Humaniora* Vol. 16, No. 3.
- Colombijn, Freek & Martine Barwegen, Dkk (Ed). 2015. *Kota Lama, Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan*. Yogyakarta: Ombak.
- Colombijn Freek & Joost Cote (Ed). 2014. *Cars, Conduits, and Kampongs: Modernization of the Indonesian City, 1920-1960*. Leiden: Brill.
- Ekadjati, Edi. S. 1995. *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hardjasaputra, A. Sobana. "Perubahan Sosial di Bandung 1810-1906" dalam *Sosiohumaniora* Vol. 5, No. 1.
- Katam, Sudarsono. 2014. *Gemeente Huis*. Bandung: Kiblat.
- Kunto, Haryoto. 1984. *Wajah Bandoeng Tempo Doeloe*. Bandung: Granesia.

- , 1986. *Semerbak Bunga di Bandung Raya*. Bandung: Granesia. Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nashih Luthfi, Ahmad, dkk. 2011. *Kronik Agraria Indonesia: Memperluas Imajinasi Lintas Zaman, Sektor, dan Aktor*. Yogyakarta: STPN Press.
- Rusnandar, Nandang. "Sejarah Kota Bandung Dari "Bergdessa" Desa Udik) Menjadi Bandung "Heurin Ku Tangtung" (Metropolitan)", dalam *Patanjala* Vol. 2, No. 2.
- Sapria. 1970. *Data-Data Kotamadya Bandung Tahun 1970*. Bandung: Biro Umum Kotamadya Bandung.
- Sitairesmi, Ratnaayu dkk. 2002. *Saya Pilih Mengungsi: Pengorbanan Rakyat Bandung untuk Kedaulatan*. Bandung: Pustaka Madani. Suganda, Her. 2014. *Kisah Para Preanger Planters*. Jakarta: Kompas.
- Tiarsa, US. 2001. *Basa Bandung Halimunan: Bandung Taun 1950-1960-an*. Bandung: Kiblat.
- Voskuil, Robert P.G.A, Dkk (terj). 2017. *Bandung, Citra Sebuah Kota*. Bandung: Penerbit ITB. Widjaja, Pele. 2013. *Kampung Kota Bandung*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yuni Choirul Nisah, Galuh & Sri Ana Handayani. "Pemukiman Liar di Surabaya Tahun 1970-2000" dalam *Publika Budaya* Vol. 2 (1) Maret 2014.